

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Pandemi Covid-19 telah melanda setiap negara di dunia. Pandemi ini berdampak negatif pada beberapa sektor. Dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Banyak pihak yang terkena dampaknya seperti pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang sudah menyusun dan menetapkan rencana anggaran mengalami kendala dan harus mengkaji ulang rancangannya.

Perekonomian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Banyak industri yang harus bangkrut karena tidak bisa lagi menjalankan bisnis dan perusahaannya. Hal ini terjadi karena peredaran uang di dunia mengalami hambatan.

Selain itu, Pemerintah berupaya mengembangkan sistem pembayaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga seluruh proses pembayaran pendapatan dan pengeluaran APBN dilakukan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab. Upaya ini dilakukan dalam rangka menerapkan sistem digital dalam pembayaran dan transaksi sehingga pembayaran sudah dapat menggunakan aplikasi digital.

Beberapa urgensi dalam pengembangan sistem pembayaran pemerintah antara lain, skala yaitu meningkatnya skala pembayaran Pemerintah merefleksikan pengembangan sistem pembayaran pemerintah telah berjalan membuat hal ini

berdampak signifikan terhadap perekonomian. Elektronik merupakan sistem pembayaran Pemerintah melalui elektronifikasi yang mampu mengurangi biaya transaksi dan mendorong efisiensi. Selanjutnya, Improvement yaitu pengembangan metode atau cara pembayaran Pemerintah mendorong perubahan di area ekonomi lainnya. (kemenkeu.go.id 2021)

Melalui pembayaran digital, semua pembayaran atau transaksi memfasilitasi transaksi tanpa batas dan memfasilitasi pencatatan dan perencanaan keuangan melalui riwayat transaksi (Wikipedia 2022). Di situlah pandemi membuat aktivitas fisik dibatasi. Kebijakan transaksi bisnis di lingkungan instansi pemerintah juga harus disesuaikan agar dapat mengikuti perkembangan tren ekonomi digital. Dalam upaya mendukung ekonomi digital dan kebijakan cashless, pemerintah telah menetapkan kebijakan transaksi pembayaran dana APBN, seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu implementasi Digital Payment.

Tujuan strategis dari sistem digital ini adalah untuk menciptakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara. Selain itu, sistem digital ini juga memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain bagi satuan kerja instansi pemerintah, yaitu otomatisasi dan integrasi proses dalam sistem pembayaran, pengadaan, pelaporan dan perpajakan, serta penyederhanaan sistem surat pertanggungjawaban (SPJ). untuk bank Sistem ini memiliki beberapa manfaat yaitu memperluas potensi pasar kredit, pelayanan kepada segmen sasaran dan meningkatkan brand mitra

pemerintah. Sedangkan bagi penyedia barang atau jasa, sistem ini membuka peluang menjadi mitra di berbagai instansi pemerintah, kepastian pembayaran dan fasilitas kredit perbankan. Dan sistem ini gratis (biaya administrasi (DJPB 2021))

Berdasarkan Peraturan DJPB Nomor PER20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digital Payment Pada Satuan Kerja, Digital Payment adalah pembayaran menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit atau pendebitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang atau jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem *marketplace*.

Proses bisnis pada sistem *marketplace* melibatkan 4 pihak antara lain satuan kerja, KPPN, Bank dan penyedia barang atau jasa. Secara singkat dapat dijelaskan pada tahap pertama satker melakukan pendaftaran melalui KPPN untuk mendapatkan user. Selanjutnya user satker mendaftarkan penyedia ke dalam sistem *marketplace* atau bisa juga mengundang penyedia yang sudah terdaftar. Satker hanya bisa mendaftarkan dan melakukan transaksi dengan vendor yang memiliki rekening yang sama dengan pihak bank yang dimana satker membuka rekening bendahara. Contohnya jika rekening bendahara satker dibuka di BNI maka vendor juga harus memiliki rekening pada BNI, demikian juga jika Bank Mandiri atau BRI (N 2021).

Dalam sistem *marketplace* tidak diperlukannya mesin EDC. Proses transaksi dalam Digital payment mirip dengan sistem *marketplace* pada umumnya, yaitu satker melakukan pemesanan, selanjutnya ada persetujuan dari vendor bahkan negosiasi dalam hal diperlukan, pengiriman barang dan

pembayaran. Proses tersebut tercatat dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem pelaporan uang persediaan. Sistem ini juga mendasarkan pada proses bisnis yang diatur dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. (E 2021)

Penggunaan DigiPay saat ini baru dapat dilaksanakan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DigiPay yang digunakan oleh Satker. Eksklusivitas platform aplikasi ini juga berdampak pada perbedaan pada teknis penggunaan platform DigiPay yang disediakan oleh bank yang berbeda. Meskipun memiliki kesamaan dalam standar proses bisnis, teknis penggunaan, diantaranya penginputan detail jenis barang/jasa, dapat berpotensi menjadi permasalahan pada penggunaan oleh rekanan yang relatif baru menggunakan DigiPay. (Rokhman t.thn.)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, adapun rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi atas penerapan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan digital payment?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yang didasari oleh rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless*
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala atas penerapan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless*
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor keberhasilan digital payment

1.4.Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup pelaksanaan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi. DJPB memiliki tujuan untuk menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efektif dan efisien, mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara. Selanjutnya, pembahasan yang lebih dalam terkait peninjauan mekanisme pelaksanaan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi serta kendala-kendala atas pelaksanaan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandem

1.5. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan :

1. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca atas penerapan dari sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi
2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca atas kendala yang terjadi di dalam penerapan sistem aplikasi digital payment dalam pelaksanaan pembayaran berbasis *cashless* selama masa pandemi
3. Dapat memberikan informasi kepada pembaca atas faktor keberhasilan dari digital payment

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diberikan penjabaran terkait gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun penulis. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat dari penulisan, serta sistematika dari penulisan KTTA yang akan dituangkan dalam beberapa bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diberikan penjelasan terkait dasar hukum, teori, kajian terdahulu, dan juga hasil data yang sudah diolah terkait dengan Digital Payment serta penerapannya di Indonesia. Landasan teori tersebut akan menjadi dasar untuk penulis dalam merumuskan pembahasan dan menarik kesimpulan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diberikan uraian terkait metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara. Sedangkan untuk metode pengolahan data penulis menggunakan SWOT. Pada bagian gambaran umum objek penulisan, penulis akan memberikan penjelasan terkait gambaran umum objek penulisan yaitu DJPB yang terdiri atas sejarah singkat, profil, visi, dan misi.

Pada bagian pembahasan hasil akan dijelaskan terkait penerapan aplikasi Digital Payment, kendala yang terjadi terkait penerapan aplikasi Digital Payment, faktor keberhasilan terkait penerapan aplikasi Digital payment

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam karya tulis tugas akhir ini. Kesimpulan yang ditarik merupakan rangkuman dari semua informasi yang diperoleh penulis serta menjawab rumusan masalah yang telah disusun.